

PENINGKATAN PENDIDIKAN MASYARAKAT MINAHASA DAN DAMPAKNYA: TINJAUAN EKONOMI DAN SOSIAL*

*Helmut Weber***

Abstract

According to statistical data, the participation of the Indonesian population in the formal educational sector is increasing rapidly. On the one hand, in terms of quantity, this increase reflects a significant success of the Indonesian development polity. But on the other hand, the more or less uncontrolled growing number of highly educated (which does not directly means highly skilled) people also contains a multitude of problematical impacts on daily life, which are rarely discussed up to now.

Based on a more quantitatively oriented case study, which has been carried out in the district Minahasa, North Sulawesi, we will discuss some aspects of social-economic change on the village level, mainly caused by the development of the educational sector. Among others, the following aspects will be scrutinized in detail: the aspiration of the village people, monopolized by formal education, education as an influential a) on monetarization of the household economy, b) on land-distribution, c) on employment problems and the composition of the local labour force, d) on spatial mobility, and e) on investment behavior on the household level. Beside these more economic items, some significant social impacts will also be discussed, such as the relation between education and individualization, the spatial distribution of the family members and its implications in terms of social; security, the differentiation of 'life-styles' and finally the alienation process between different generations.

Pengantar

Studi kasus ini dipusatkan pada istilah 'aspirasi'. Dalam konteks penelitian ini aspirasi berarti keinginan masyarakat desa akan masa depan dirinya dan generasi berikutnya, atau harapan mereka terhadap tujuan kehidupan. Peranan aspirasi dalam kehidupan sehari-hari bukan bersifat abstrak melainkan kongkret, sebab aspirasi mempengaruhi proses pengambilan keputusan rumah tangga dan cara pelaksanaan keputusan dalam

menyusun kegiatan-kegiatan sosial/ekonomis.

Penerapan aspirasi sebagai kategori analisis memberikan manfaat rangkap. Di satu pihak, aspirasi itu mencerminkan persepsi/penyesuaian masyarakat terhadap perubahan sosial yang telah terjadi, di pihak lain penafsiran pelaksanaan aspirasi oleh si peneliti akan menggarisbawahi peranan aktif para masyarakat sendiri dalam proses transformasi sosial, sebab dalam

* Data yang dibahas dalam makalah ini merupakan sebagian hasil penelitian dari sebuah proyek kerja sama antara Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT), Manado dan Fakultas Sosiologi (Jurusan Sosiologi Perkemhangan), Universitas Bielefeld, Jerman. Studi kasus ini dilaksanakan di Desa Kanonang, Kecamatan Kawangkoan, Minahasa.

** Helmut Weber, PhD adalah staf peneliti Pusat Penelitian UGM.

percobaan merealisasikan keinginan akan masa depan, masyarakat sendiri mempengaruhi perubahannya, jadi diri mereka sendiri menjadi aktor sosial.

Secara umum, dalam konteks penelitian ini, titik berat istilah aspirasi menyangkut bahasan tiga subtopik:

1. **Pola Aspirasi dan Awal-Mulanya.**
Pada awalnya didiskripsikan pola aspirasi yang paling menonjol di tempat penelitian, termasuk awal-mulanya. Pertanyaan utama yang perlu dijawab menyangkut interaksi antara perubahan struktural dan persepsi/penyesuaian masyarakat.
 2. **Dampak Strategi Pelaksanaan dari Segi Ekonomi.**
Dibahas pengaruh pelaksanaan strategi pendidikan terhadap perubahan ekonomi, baik di tingkat rumah tangga, desa, dan ekonomi daerah.
 3. **Dampak Strategi Pelaksanaan dari Segi Perubahan Sosial.**
Ditanyakan sejauh mana aspirasi itu akan mengakibatkan perubahan sosial, misalnya mobilitas, baik vertikal maupun horizontal, hubungan antara generasi, kontrol sosial, individualisasi, dan sebagainya? Apakah pelaksanaan tersebut menciptakan persoalan-persoalan sosial (*social problems*).
- I. **Daerah Penelitian: Pola Aspirasi Penduduknya, Struktur Nilai Sosial dan Ciri-Ciri Ekonomi Desa**

1. Aspek kuantitatif

Hasil penelitian tentang arah dan tujuan aspirasi di desa penelitian menunjukkan bahwa harapan masyarakat desa terhadap masa depan sangat didominasi oleh keinginan mengikuti jalan pendidikan formal yang

sekahigus merupakan jalan vertikal di dalam sistem stratifikasi sosial. Meskipun dari segi persentase tingkat partisipasi dalam pendidikan kelihatannya lebih kuat dibandingkan dengan daerah-daerah lain, bagi masyarakat Minahasa aspirasi tersebut sebagai kecenderungan yang begitu eksklusif. Keinginan meninggalkan sektor primer (pertanian) yang dianggap terlalu kasar untuk menjadi *white-collar worker*, terutama di bidang pemerintahan, telah mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam rumah tangga-rumah tangga, juga di sektor-sektor lain di Indonesia (bandingkan Effendi et.al 1990: 31, Notodihardjo 1990: 68; dan Murgianto 1991: 66).

Ditanyakan pada masyarakat Desa Kanonang tentang pekerjaan yang diinginkan, baik kepada orang tua maupun kepada para pemuda sendiri; sekitar 43 persen menyebutkan bertujuan mencapai sarjana untuk menjadi pegawai negeri golongan tinggi, kurang lebih 20 persen memfavoritkan ABRI, dan persentase hampir sama menginginkan sebagai pegawai swasta. Kurang lebih 9 persen mengutamakan sebagai pendeta. Anehnya sama sekali tidak ada yang menyebutkan ingin menjadi petani, tukang, atau buruh industri. Sebagian kecil saja (di bawah 5 persen) cenderung menjadi pedagang profesional.

Pola aspirasi yang diarahkan pada peningkatan pendidikan formal mencerminkan kontradiksi antara keinginan akan masa depan dan *status quo* ekonomi desa. Nyata bahwa pembagian tenaga kerja antarbidang masih sangat rendah. Ekonomi desa masih tetap didominasi oleh sektor primer; sekitar 86 persen dari seluruh rumah tangga berpendapatan dari

sumber pertanian, baik sebagai petani yang mempunyai tanah sendiri maupun sebagai buruh tani. Bidang pekerjaan lain, misalnya pertukangan atau pedagang profesional (berjual-beli) pada umumnya hanya sebagai penghasilan sampingan.

TABEL 1.
PROFIL PEKERJAAN UTAMA

Pekerjaan	Persentase
Petani	80,2
Buruh Tani	6,2
Pertukangan	0,5
Pegawai (negeri dan swasta)	7,0
Pedagang	2,3
Pengangkutan	0,5
Penganggur/Pencari Kerja dan lain-lain	2,1
	1,2

Pada Tabel 1. dimasukkan data semua penduduk Kanonang yang tetap tinggal di desa. Jika ditambahkan dengan semua anak di atas usia 20 tahun yang lahir di desa, tingkat persentase pekerja sebagai pegawai naik lebih dari 100 persen dan menjadi 15,6 persen. Dari jumlah 15,6 persen tersebut, 45 persen hidup tetap di desa, 40 persen di ibu kota Propinsi Manado, 11,6 persen di tempat lain di Minahasa, dan 3,4 persen di luar Kabupaten Minahasa, terutama di Jawa.

Kecenderungan rakyat desa untuk keluar dari sektor pertanian dapat dicerminkan melalui perbandingan antara tingkat pendidikan masyarakat desa keseluruhannya dengan persentase partisipasi pada sektor pendidikan menurut kelompok umur.

Jika dibandingkan tingkat pendidikan formal keseluruhan penduduk Desa Kanonang pada Grafik 1. dengan persentase murid/mahasiswa

sesuai dengan usia dalam Grafik 2., maka terlihat bahwa perkembangan di bidang pendidikan nyata cukup signifikan. Hal itu dikelompokkan menurut angkatan usia, partisipasi di bidang pendidikan tingkat SMP naik dari 16,6 persen menjadi 69 persen, tingkat SMA 23,3 persen menjadi 62,5 persen, dan perguruan tinggi dari 7,8 persen menjadi 14 persen.

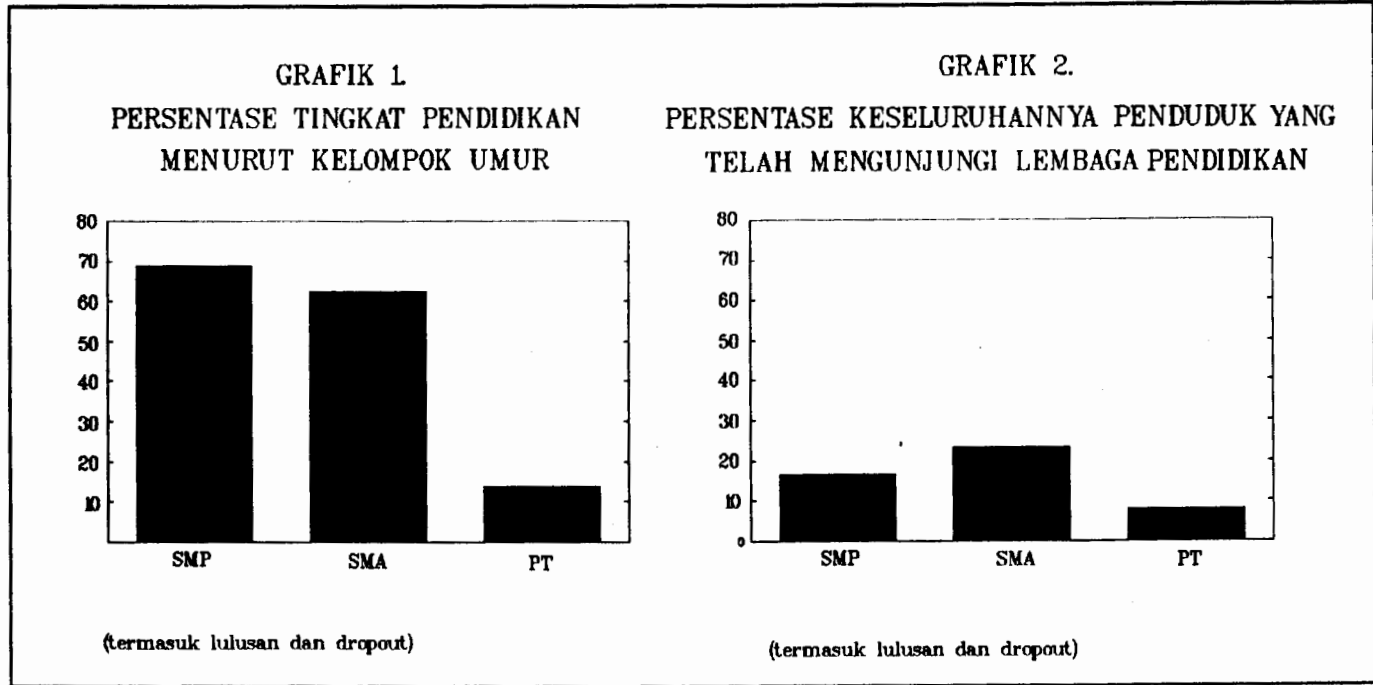
2. Aspek Kualitatif: Faktor-Faktor Penyebab dan Prinsip 'Jaga Nama'

Ditanyakan tentang kemungkinan-kemungkinan aspirasi, bahwa masyarakat desa sendiri tidak meragukan strategi pendidikan bagi anak-anak. Seperti telah dijelaskan bahwa dalam wawancara mengenai masa depan yang diharapkan oleh orang tua terhadap anak-anak, hampir semua menyebutkan pegawai (negeri) sebagai tujuan pertama. Selanjutnya, dalam klasifikasi *white collar*, jabatan sebagai dosen di Universitas Sam Ratulangi sering diutamakan.

"Ya, memang kami ingin sekali menyekolahkan anak-anak kami. Mungkin mereka berhasil dan bisa menjadi pegawai negeri. Kami bekerja saja sebagai petani. Kami adalah orang sederhana, tetapi kami mencoba memperbaiki nasib bagi anak kami..."

"Bekerja sebagai dosen di UNSRAT adalah sesuatu yang luar biasa. Sampai sekarang kami di desa mempunyai beberapa anak yang bekerja di sana, dan sungguh-sungguh kami bangga sekali..." (Petani)

Rasionalitas masyarakat desa menghasilkan peningkatan pendidikan dan mendorong perubahan yang sangat



pesat dari rumah tangga petani ke arah rumah tangga pegawai. Banyak peneliti mengutamakan pertimbangan ekonomis sebagai faktor pendorong (misalnya Clauss/Hartmann 1981: 21, Karcher 1985: 64, Benda-Beckmann F. dan K. 1989: 8, dan Buchholt 1988: 253). Dalam studi-studi tersebut, terutama gaji yang tetap, hak terhadap pensiun, bantuan dalam keadaan darurat, dan kemungkinan mendapat kredit lebih gampang diperhitungkan sebagai aspek-aspek pertimbangan. Bagi masyarakat Desa Kanonang, jika ditanyakan lebih mendalam, mereka cukup sadar mengenai risiko dan bahaya ekonomis yang dikaitkan dengan strategi pendidikan. Perhitungan berikut menyimpulkan pandangan responden-responden di desa.

1. **Pengeluaran:** mengikuti jalur pendidikan formal memerlukan sejumlah modal yang tinggi. Khusus untuk studi di universitas, biaya yang perlu dipenuhi kurang-lebih antara 3 dan 4 juta rupiah (tahun 1988).
2. **Tenaga kerja:** membebaskan anak-anak untuk memasuki lembaga-lembaga pendidikan mengurangi potensi tenaga kerja di rumah tangga. Dalam tradisi di pedesaan, peranan anak-anak sebagai pencari nafkah cukup besar (bandingkan White 1976: 271). Ketidakhadiran anak-anak sebagai tenaga kerja sering perlu dikompensasikan, baik melalui peningkatan pekerjaan orang tua/anggota keluarga sendiri maupun, terutama pada saat

menaburkan benih dan panen, dengan cara menyewa tenaga kerja. Dengan demikian, beban yang dipikul oleh rumah tangga berlipat dua, yaitu 1) peningkatan kebutuhan *cash* untuk biaya sekolah, dan 2) kenaikan pengeluaran rumah tangga untuk mengupah tenaga kerja.

3. **Kesulitan masuk perguruan tinggi:** kemungkinan bagi anak untuk menjadi mahasiswa semakin kecil. Ketidakseimbangan antara penyediaan tempat studi dan permintaan meningkatkan persaingan antara calon-calon mahasiswa, dan persaingan tersebut mewakili persaingan antara rumah tangga. Masalah itu juga membawa konotasi ekonomis yang cukup besar. Sesuai dengan perkembangan ketidakseimbangannya, ongkos studi 'luar biasa' semakin naik dengan pesat, terutama untuk 'uang pelicin'. Dengan memburuknya kemungkinan menjadi mahasiswa melalui jalan biasa, kemampuan untuk membayar 'uang ekstra' maupun hubungan dengan 'orang dalam' menjadi prasyarat yang penting. Sebab itu, banyak keluarga dengan kondisi ekonomis yang terlalu lemah terpaksa kalah dalam persaingan itu.
4. **Pengangguran:** kemungkinan sarjana menjadi pegawai semakin merosot. Gejala ini juga dialami oleh masyarakat desa. Sebagian lulusan PT yang menjadi penganggur, yang 'sedang mencari kerja', atau yang

* Misalnya pada tahun 1991 sebanyak 1,3 juta lulusan SMTA dari seluruh Indonesia memperebutkan hampir 110 ribu kursi mahasiswa baru perguruan tinggi negeri dalam ujian masuk perguruan tinggi. Jadi, hanya 8,4 persen dari jumlah calon itu akan mendapat tempat studi di PTN.

menerima pekerjaan tidak sesuai dengan harapan semakin besar. Persaingan terhadap lowongan kerja semakin ketat sebab pertumbuhan jumlah sarjana sekaligus diikuti oleh penurunan kemampuan pemerintah/lembaga swasta untuk menerima pegawai baru. Jadi, banyak anak desa yang pulang ke desa (reimigrasi?) sebab pengangguran semakin naik. Sejalan dengan ketidakseimbangan antara lowongan dan permintaan kerja, gejala uang pelicin menjadi beban besar, terutama untuk keluarga berpendapatan rendah.

5. Masalah pendapatan pegawai. Pada umumnya, gaji pokok yang diterima sebagai pegawai negeri (terutama golongan I dan II) sering tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selalu terjadi bahwa pegawai terpaksa harus mencari pekerjaan sambilan, selain itu mereka (terutama sebagian yang hidup di kota) masih sering dibiayai keluarga di desa.

Lima masalah pokok tadi diakui oleh masyarakat berdasarkan pengalamannya. Meskipun pertimbangan strategi pendidikan dari segi ekonomi kurang meyakinkan, namun sampai saat ini tujuan aspirasi itu hampir tidak diragukan. Dengan kata lain, perasaan pesimis terhadap jaminan ekonomis tidak begitu mempengaruhi kelangsungan tujuan aspirasi.

Bagaimana keanehannya dapat dijelaskan? Yang merupakan dasar pola aspirasi masyarakat Desa Kanonang adalah salah satu interaksi antara adat-istiadat sebagai faktor tradisional dengan keinginan meningkatkan posisi dalam kedudukan melalui pendidikan sebagai elemen baru. Berbeda dari pendekatan klasik dari James Scott

(1976), rasionalitas petani tidak begitu terbatas pada *safety-first* prinsip untuk menjamin *subsistence-floor* saja, jadi bersifat statis. Sebaliknya, dalam studi kasus ini aspirasi masyarakat desa bersifat dinamis, jadi terbuka untuk perubahan, baik dari segi ekonomi maupun dari segi sosial. Selanjutnya, teori populer kedua, yaitu pendekatan dari pandangan *political economy* seperti diwakili oleh Popkin (1979) juga terlalu lemah untuk mengucapakan kenyataan rasionalitas tersebut. Scott menilai kekuasaan struktur nilai sosial tradisional terlalu tinggi dan tidak memperhatikan fleksibilitas dalam perubahan norma sosial, sedangkan Popkin menggarisbawahi rasionalitas modern bagi petani tanpa betul-betul memberikan perhatian pada kekuasaan norma sosial dan perasaan persatuan dalam kehidupan sehari-hari di desa.

Elemen baru terpenting yang telah masuk ke dalam struktur nilai sosial di desa adalah kewajiban bagi masyarakat untuk sukses, untuk meningkatkan taraf hidup. Lain apabila dibandingkan dengan masyarakat yang lebih tradisional (bentuk Scott), di mana prinsip *ascription* masih lebih kuat dalam penentuan posisi sosial, prinsip *achievement* bersifat lebih dominan dalam masyarakat Minahasa kontemporer. Akan tetapi, peranan prinsip *achievement* modern tersebut tidak dapat dipahami tanpa dikaitkan dengan sebuah norma tradisional, yaitu prinsip 'jaga nama'.

Dalam struktur nilai sosial masyarakat desa (terutama bagi generasi tua), nama (reputasi) yang baik masih tetap merupakan dasar jaminan sosial dan sekaligus ekonomis. Seseorang yang bekerja dengan baik, yang memenuhi keinginan lingkungan sosial, yang hidup sesuai dengan norma sosial akan

diterima dan dinilai tinggi oleh masyarakat; selain posisi sosial itu, sebagai pembawa nama yang baik sekaligus mereka berhak mendapat bantuan ekonomis, terutama dalam keadaan darurat. Jika ditafsirkan dengan pendekatan Pierre Bourdieu (1983), seorang sosiolog dari Prancis, nama yang baik juga bersifat sebagai kapital, tetapi tidak langsung dalam bentuk ekonomis melainkan sebagai kapital sosial. Akhirnya, kapital sosial itu juga dapat dimonetarisasikan misalnya untuk mendapat bantuan ekonomis dalam keadaan kritis atau keunggulan dalam persaingan dengan seorang/keluarga yang memegang nama yang tidak begitu baik (misalnya persaingan dalam pembelian tanah dan sebagainya).

Dalam konsep masyarakat desa yang dibahas dalam makalah ini, kewajiban untuk sukses difokuskan pada pendidikan sebagai alat utama dalam mobilitas vertikal. Seperti dijelaskan tadi, keinginan masyarakat desa untuk mengikuti jalan pendidikan tidak merupakan jalur rumah tangga masing-masing, melainkan sebagian dari struktur nilai sosial. "Pendidikan masuk adat", yang selalu disebutkan oleh penduduk di tempat penelitian, menunjukkan pada keterkaitan antara norma sosial dan proses pengambilan keputusan. Mau atau tidak, rumah tangga-rumah tangga yang ingin diterima oleh lingkungan sosial harus mencoba meningkatkan pendidikan bagi anak-anak setinggi mungkin. Melalui partisipasi dalam "lomba pendidikan", nama keluarga bisa dijaga atau diperkuat.

"Kami tidak hidup sendiri, kami hidup di tengah masyarakat. Kami tidak bebas. Kami ingin diterima oleh tetangga, keluarga, dan teman-teman di sini. Semua

penduduk di desa ini ingin sukses demi kemajuan dalam kehidupan Semua mencoba menjadi sebagian yang baik dari masyarakat. Kami mempunyai nama baik yang perlu dijaga ... Baik artinya bahwa kami tidak menunggu sampai kami mendapat sesuatu dari orang lain. Lebih baik memberi daripada mengambil. Seorang yang baik bisa menyesuaikan diri dengan syarat-syarat baru, dia harus bersikap murah hati, jujur, ramah, dan rajin. Terutama dia harus berpikir tentang masa depan, harus bekerja rajin untuk menyekolahkan anak-anak" (Petani)

Prinsip "jaga nama" itu dewasa ini bersifat dinamis, dalam arti 'ketidakmajuan' yaitu kemunduran, kepuasan sebuah rumah tangga dengan tingkat perkembangannya yang telah dicapai jelas akan dinilai negatif oleh masyarakat. Hasil strategi pembangunan rumah tangga telah menjadi sebagian dari 'nama' keluarga dan nama itu selalu perlu dibuktikan dengan hasil baru.

"Kami harus sadar tentang tuntutan-tuntutan dari lingkungan sosial kami. Tidak selalu gampang memenuhi yang terduga. Semakin banyak hasil perkembangan semakin banyak yang diduga oleh lingkungannya. Jika kami menyekolahkan anak pertama sampai perguruan tinggi, pasti kami harus mencoba yang sama untuk anak-anak berikutnya. Sukses itu dapat dianggap sebagai kebiasaan. Misalnya pada rumah tangga pegawai, terpaksa orang tua harus mengurus terus supaya anak-anak mencapai tingkat pendidikan sama. Tidak

boleh bahwa seorang pegawai bilang: *"Tidak perlu terlalu lama di sekolah. SMP saja cukup, pokoknya tabu baca dan tulis. Saya senang dengan anak yang menjadi petani"*. (Guru SD)

3. Akar-Akar Aspirasi: Catatan tentang Aspek Sejarah

Bagaimana proses 'pendidikan masuk adat' dari segi transformasi masyarakat? Menurut hasil wawancara biografis dengan orang-orang yang tua di desa, aspirasi masyarakat desa terhadap pendidikan telah sangat menonjol pada zaman Belanda. Anggota masyarakat yang menjadi pegawai, misalnya sebagai guru atau bekerja di bidang administrasi, sejak lama dinilai tinggi oleh lingkungan sosial karena dianggap bahwa mereka lebih pintar dan berpengalaman dibandingkan dengan masyarakat petani. Hubungan antara penduduk Minahasa dan penjajah Belanda sejak dulu bersifat sangat positif, sebab pendatang-pendatang diterima sebagai pembawa agama Kristen dan kebudayaan, anggota masyarakat yang bekerja sama dengan pemerintah penjajah pada umumnya juga dinilai sebagai sesuatu yang istimewa, yang mencerminkan modernitas. Selain itu, dalam awal proses diferensiasi sosial, terutama anggota-anggota dari keluarga yang berstatus tinggi secara tradisional (hukum besar, kepala suku, dukun/walian/tounaas, dll.) diterima sebagai murid/mahasiswa. Hal itu disebabkan oleh strategi penjajah yang lebih memperhatikan keuntungan bagi keluarga yang berkbarisma. Dengan mengikat hubungan yang baik dengan keluarga yang strategis, maka rakyat biasa lebih gampang dapat

diintegrasikan demi kepentingan penjajah.

"Sejak dulu, seorang pegawai merupakan sesuatu yang luar biasa, meskipun di lihat dari segi gaji cuma sebagian kecil di antaranya menjadi kaya. Tetapi yang menjadi pegawai harus lama bersekolah, harus studi. Jadi dia membuktikan bahwa dia tidak hanya mampu bekerja di kebun, melainkan juga dia menggarisbawahi kepandaian dan kerajinan. Dia belajar banyak dan tahu banyak tentang yang terjadi di dunia. Sebab itu, mereka sangat kami hormati. Kami bangga sekali jika seorang dari anggota keluarga kami menjadi pegawai..."

"Dulu, pada zaman Belanda, memang tinggi sekali status sosial seorang pegawai. Mereka banyak berasal dari keluarga berkuasa. Kalau dia lewat jalan raya di desa, semua anak lari karena malu dan takut bertemu dengan dia. Semua di sini menghormati seorang pegawai, dan mereka sendiri memberikan banyak bantuan terhadap perkembangan desa kita. Tetapi dari segi status ekonomi keadaan mereka tidak selalu baik. Terutama antara zaman PERMESTA dan awal ORDE BARU banyak pegawai di sini berhenti kerja, karena pendapatan terlalu kurang. Gaji sering baru cukup untuk beli tiga liter beras. Meskipun demikian, status mereka selalu tinggi sampai sekarang sebab mereka telah membuktikan kerajinan dan kepandaiannya" (Petani).

Meskipun aspirasi yang diarahkan pada tujuan pendidikan telah sangat

kuat pada zaman Belanda, ongkosnya waktu itu terlalu mahal, terutama untuk sekolah Belanda dan sekolah lanjutan. Sebab itu, seleksi murid/mahasiswa ketat sekali. Hanya sejumlah kecil dari anak desa ada kemungkinan dapat masuk sekolah, dan beban bagi keluarganya waktu itu telah cukup berat.

"Kakak saya pernah masuk sekolah Belanda. Tetapi karena biaya begitu tinggi, terpaksa kami menjual banyak tanah dan semua anggota keluarga harus kerja keras hanya untuk biayanya. Juga terjadi bahwa beberapa keluarga menjual semua tanah. Tetapi jarang, karena pada umumnya kami terlalu miskin. Selain masalah uang jumlah kursi di sekolah terlalu kurang. Dalam satu tahun sebanyak 400 orang mencalonkan tetapi hanya 7 yang diterima...." (Ibu A./Petani/Pedagang Kecil).

Meskipun demikian, pendidikan dasar (dalam arti bebas buta baca dan buta tulis) pada tahun 1930 jauh lebih berkembang di Minahasa daripada di daerah-daerah lain di Indonesia. Misalnya persentase untuk Jawa dan Kalimantan pada tahun itu baru sekitar 5 persen, di Sumatera 10 persen, di Sulawesi Utara keseluruhannya kurang lebih 30 persen, dan Minahasa sedikit di bawah 40 persen (bandingkan Jones 1977: 67). Sebagai kecenderungan, data tersebut menunjukkan bahwa sejarah pendidikan di Minahasa lebih panjang dibandingkan dengan daerah lain, dan selanjutnya statistik itu menggaris-bawahi efisiensi dalam perkembangan bidang pendidikan, yang terutama

digunakan oleh penjajah Belanda sebagai alat kristianisasi.

Seperti telah dijelaskan, meskipun kemajuan di bidang pendidikan dasar cukup pesat di Minahasa, pembagian kemungkinan memasuki sekolah lanjutan masih kurang merata, terbatas pada keluarga berkuasa dan yang berstatus strategis. Akibatnya adalah terjadi ketidakseimbangan antara aspirasi dan kemungkinan. Ketidakseimbangan tersebut semakin berkurang sesudah kemerdekaan, terutama sejak awal Orde Baru. Hal itu disebabkan oleh:

- (a) perluasan sektor pendidikan formal yang berarti, yaitu rasio antara jumlah penduduk dan penawaran tempat pendidikan semakin baik (sekarang semakin merosot lagi).
- b) dibandingkan dengan zaman Belanda ongkos untuk menyekolahkan anak lebih rendah, dan
- c) peningkatan pendapatan rumah tangga melalui moneterisasi dan juga sebagai hasil dari revolusi hijau.

II. Pelaksanaan Aspirasi dan Dampaknya dari Sudut Ekonomi

Keinginan menyekolahkan anak sebagai salah satu strategi epidemis mempengaruhi struktur ekonomi segala tingkat, baik di tingkat ekonomi rumah tangga maupun ekonomi desa dan daerah.

Pengaruh tersebut paling tampak pada rumah tangga yang berhasil menyekolahkan anak-anak ke perguruan tinggi. Sampai tingkat SMA, ongkos yang dikaitkan dengan pendidikan belum begitu signifikan,

* . Tentang perkembangan dan diferensiasi sistem pendidikan formal pada zaman Belanda bandingkan Kroeskamp 1974 dan Buchholt 1990.

sebab jarak antara desa dan sekolah-sekolah SMA (yang terletak di ibu kota kecamatan) tidak terlalu jauh. Pada sekolah-sekolah di bawah perguruan tinggi, biaya pendidikan, transport, asrama, makan, dan lain-lain belum terlalu mahal.

Dengan memasuki perguruan tinggi, maka ongkos rutin bagi seseorang bertambah pesat. Selain terjadi ketidakseimbangan antara lowongan tempat studi dan permintaannya, mahalnnya studi di perguruan tinggi mengakibatkan perbedaan antara persentase murid SMA menurut kelompok umur (62,5 persen) dan persentase mahasiswa (14 persen) di Desa Kanonang mencolok.

1. Moneterisasi Ekonomi Rumah Tangga

Salah satu aspek ekonomis yang diakibatkan oleh perkembangan pendidikan adalah pengembangan moneterisasi ekonomi rumah tangga. Peningkatan kebutuhan pendapatan moneter untuk memenuhi ongkos pendidikan menjadi faktor pendorong terpenting terhadap transformasi dari ekonomi rumah tangga dalam bentuk subsistensi dan *moral economy* ke arah ekonomi pasar. Bagian produksi *cash-crop* penanaman tanah khusus untuk pemasaran, semakin besar, dan sebaliknya peranan produksi subsistensi terbatas pada percobaan mengurangi pengeluaran rumah tangga. Selanjutnya rasionalitas terhadap ternak sapi dan babi (atau kuda) sebagai bentuk jaminan sosial/ekonomis tradisional sering

digantikan dan menjadi asuransi ongkos pendidikan.

Menurut hasil penelitian kami (Weber dkk, 1989) sesuatu yang sering terjadi (selain peningkatan pemasaran hasil pertanian dan penjualan ternak) adalah penjualan tanah untuk mendapat modal. Dengan penjualan tersebut, maka jaminan ekonomis di rumah tangga pertanian semakin merosot secara langsung; Sebab luas pemilikan tanah pada umumnya agak sempit, sehingga penjualan tanah membawa bahaya cukup tinggi. Jika diperhatikan ada kemungkinan dihadapi masalah pengangguran yang semakin besar bagi lulusan perguruan tinggi, stabilitas ekonomi rumah tangga semakin lemah. Kalau sebagian tanah telah dijual dan anak sebagai penganggur, maka kemampuan menjamin kelangsungan kehidupan semakin merosot.

2. Mobilitas Kawasan

Selain moneterisasi ekonomi pedesaan, pemilikan tanah, dan peningkatan ketergantungan ekonomi rumah tangga di kota kepada bantuan dari pedesaan, mobilitas kawasan merupakan salah satu dampak lain lagi yang sangat menonjol.

Peningkatan tingkat pendidikan mendorong perpindahan penduduk dari pedesaan ke kota. Pergeseran penduduk ditandai dengan penduduk memasuki perguruan tinggi sebab semua lemhaga diletakkan di kota, terutama di Manado dan sebagian kecil di Tomohon. Komposisi arus pergeseran penduduk itu tidak terbatas pada

* Menurut sensus kami, pembagian tanah per rumah tangga rata-rata 0,66 ha. ladang (tanah kering). Dari semua rumah tangga di desa 8,7 persen termasuk petani tunawisma dan kurang-lebih 11 persen memiliki lebih dari 2 ha. Sebagian besar (53,55 persen) mempunyai antara 0,3 dan 1 ha.

kelompok mahasiswa perguruan tinggi dan lulusannya. Angkatan tenaga kerja yang berpendidikan SMP dan SMA merupakan potensi bermigrasi yang cukup besar. Kerendahan tingkat diferensiasi ekonomi desa antara petani dan pegawai mendorong sebagian besar dari kelompok pencari kerja luar sektor pertanian untuk meninggalkan desa. Selain itu, rumusan *semakin tinggi pendidikan semakin rendah keinginan mengikuti pekerjaan yang dianggap kasar* dapat dibuktikan dengan jelas. Menurut hasil penelitian ini, juga dalam kelompok lulusan SMP dan SMA yang tidak mampu melanjutkan pendidikan, hampir tidak ada yang ingin menjadi petani, buruh, atau tukang. Sebagian besar mencari pekerjaan di bidang administrasi, sebagian kecil di sektor lalu lintas dan jasa lain.

Gejala tersebut menciptakan mobilitas penduduk rangkap dua. Sebagian besar dari rakyat desa berpendidikan menengah dan tinggi telah atau akan pindah ke perkotaan. Eksodus angkatan tenaga kerja itu mendorong arus migrasi kedua, yaitu mobilitas kawasan antara desa yang belum lama mulai. Arus migrasi tersebut dibagi dua, baik sebagai tenaga kerja musiman maupun sebagai penggarap tanah secara tetap, berdasarkan atas prinsip bagi hasil antara keluarga yang memiliki tanah dan keluarga yang bekerja; biasanya sebagian dari keluarga luas akan dipanggil ke desa sebagai tenaga kerja tetap.

Komposisi kelompok yang mengikuti perpindahan permanen lain dapat dibandingkan dengan komposisi pekerjaan musiman. Kemerosotan penyediaan tenaga kerja untuk pekerjaan 'kasar' di Kabupaten Minahasa sendiri menarik 'impor' tenaga kerja dari kabupaten-kabupaten

tetangga dengan tingkat perkembangan/kemajuannya lebih rendah, terutama dari Bolang-Mongondow dan Kepulauan Sangir-Talaud. Permintaan tenaga kerja dari daerah-daerah tersebut juga didorong oleh perbedaan harga pekerjaan yang jauh lebih rendah bagi tenaga kerja luar Minahasa dibandingkan dengan tenaga kerja dari Minahasa sendiri.

3. Keterkaitan antara Ekonomi Rumah Tangga Pedesaan dan Anggota-Anggota Keluarga di Kota

Salah satu aspek ekonomi lagi adalah keterkaitan ekonomis antara bagian keluarga yang ditinggalkan di pedesaan dan bagian lain yang bekerja di kota. Berdasarkan hasil penelitian ini, terlihat ketergantungan seseorang yang bekerja di sektor formal di kota kepada bantuan dari jaringan sosial. Dengan data dari studi kasus ini, maka hipotesis dapat dibuktikan, bahwa sektor formal (dalam konteks terutama pada tingkat pegawai) sering didukung oleh ekonomi pedesaan. Sebagian besar rumah tangga dari Desa Kanonang yang pindah ke Manado belum mampu hidup mandiri. Tingkat monetisasi dalam rumah tangga di kota sangat tinggi sebab hampir semua kebutuhan harus dipenuhi dengan uang. Bahan makanan serta bahan bakar perlu dibeli di pasar dan rumah pada umumnya harus disewa. Selain itu, transport, biaya sekolah, kesehatan, dan kebutuhan lain memerlukan biaya secara moneter. Berdasarkan atas latar belakang tersebut, maka bantuan yang diberikan dari bagian keluarga yang masih hidup di desa sangat berperan terhadap kelangsungan hidup bagi rumah tangga pegawai, baik dalam bentuk bahan

(sayur, beras, daging, dll.) maupun dalam bentuk uang.

"Anak perempuan kami mengajar di SMP di Manado, suami dia pekerja di Pelabuhan Bitung. Dua-duanya adalah pegawai negeri. Karena itu mereka mempunyai pendapatan rumah tangga sangat baik dibandingkan dengan rumah-tangga rumah-tangga pegawai lain di Manado. Tetapi mahal kehidupan di Manado. Semua perlu dibayar, untuk rumah dan makanan, untuk apa saja. Juga ongkos transport mereka ke sekolah atau ke Pelabuhan Bitung sangat tinggi. Pada umumnya mereka mampu memenuhi ongkos tersebut. Tetapi untuk biaya pendidikan perguruan tinggi kemampuan mereka sangat terbatas. Karena itu, keluarga anak kami selalu dapat bantuan, baik bahan-bahan maupun uang. Kami masih mampu sebab kebetulan kami mempunyai satu anak saja. Tahun lalu kami menjual satu kolam ikan berharga hampir satu juta. Hanya untuk biaya perguruan tinggi bagi dua cucu. Selalu demikian" (Petani).

4. Kesimpulan Sementara

Sebagai asumsi dari analisis dampak aspirasi pendidikan dari segi ekonomi, maka dapat dikatakan bahwa lebih daripada memecahkan persoalan ketenagakerjaan, peningkatan tingkat pendidikan menciptakan masalah ekonomis. Sebuah perbandingan antara sektor-sektor ekonomi masing-masing menggarisbawahi ketidakseimbangan dalam pembangunan ekonomi Minahasa. Seperti di Indonesia secara keseluruhannya, peranan sektor

pertanian semakin turun, sedangkan kenaikan persentase tenaga kerja yang diterapkan oleh sektor jasa tumbuh dengan pesat, tetapi sektor industri pengolahan hampir belum dikembangkan dalam proses pergeseran antarsektor.

Pergeseran tersebut disebabkan oleh dua faktor. Pertama, dari segi aspirasi dan struktur nilai sosial, penilaian terhadap pekerjaan, baik di sektor pertanian maupun di sektor industri (terutama industri kecil, juga pekerjaan kasar di industri sedang dan besar) sangat rendah. Selain itu, perkembangan pendidikan di daerah Minahasa tidak menyediakan tenaga kerja yang cukup berani, kreatif, dan fleksibel untuk berwiraswasta. Kedua, yang mempengaruhi stagnasi perkembangan sektor sekunder adalah masalah dalam bentuk akumulasi dan rasionalitas investasi modal. Kemampuan (atau keinginan) untuk mengumpulkan dana di tingkat rumah tangga merupakan prasyarat yang sangat penting terhadap perkembangan sektor industri, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Kalau ditafsirkan masalah modal investasi di tingkat rumah tangga di Minahasa, maka terlihat pengeluaran rumah tangga didominasi oleh biaya sekolah/studi. Secara kasar harus dibedakan antara dua kelompok rumah tangga. Yang pertama mempunyai status ekonomi terlalu rendah, baik untuk menyekolahkan anak maupun untuk mengumpulkan modal investasi, yang dapat ditanam untuk mengembangkan sektor ekonomi. Kelompok kedua adalah rumah tangga yang selisih antara pendapatan dan pengeluaran cukup besar, dengan potensi pengumpulan modal sangat tinggi. Untuk kelompok tersebut, data menunjukkan ada

pengaruh negatif ongkos pendidikan terhadap potensi mengakumulasi modal. Tanpa kecuali, semua rumah tangga kelompok kedua yang diteliti mempergunakan lebih dari 50 persen keseluruhan pengeluaran khusus untuk biaya sekolah, sebagian sampai 80 persen. Dengan demikian, rata-rata kelebihan pendapatan setelah kebutuhan pokok dipenuhi dihabiskan melalui investasi pada strata pendidikan.

Sebagai asumsi sementara harus dikatakan bahwa dalam keadaan transformasi ekonomi di Minahasa dewasa ini, perkembangan pendidikan tidak mendorong kemajuan dalam arti peningkatan diversifikasi dan diferensiasi antara tiga sektor ekonomi (pertanian, industri, pengolahan, dan jasa). Dampak utama dari strategi pelaksanaan aspirasi adalah penciptaan sebuah klasifikasi diferensiasi sosial yang membedakan antara pekerjaan kasar (petani, buruh industri, pertukangan, dll.) dan pekerjaan halus (*witbe collar job*). Persiapan para lulusan lembaga-lembaga pendidikan terutama diarahkan kepada tujuan pegawai/karyawan tetapi bukan untuk menjadi majikan sendiri. Sebab itu, kami bisa bertanya bersama-sama dengan Dore:

"Is it any wonder, then, that the products of this kind of schooling are not, when cooled out of their modern sector hopes and settled back on their farms, notably more innovative and successful farmers than those who have not been to school? Is it surprising that the frustrations of unemployed school leavers and university graduates have not proved to be that fructifying kind of tension that breeds the successful entrepreneurs? The whole of

their schooling has conditioned them to become employees. The whole of the modern sector is an employee sector; its employee teacher, the representative of the modern sector in the village, demonstrates the employee model in himself. The would-be employee has learned to take orders, not initiatives (Dore 1976: 11).

III. Pelaksanaan Aspirasi dan Dampaknya dari Segi Ilmu Sosial

Perkembangan bidang pendidikan di Minahasa membawa beraneka-ragam akibat terhadap kehidupan sosial di pedesaan. Antara lain, kecenderungan ke arah perpisahan antara tempat lahir dan tempat pendidikan (dengan kata lain antara sosialisasi primer dan sekunder) mempengaruhi peranan kehidupan desa bagi penduduknya. Pada umumnya untuk bagian generasi tua, desa masih tetap merupakan fokus kehidupan, baik dari segi ketergantungan ekonomi maupun orientasi sosial. Bagi angkatan muda kepentingan desa dalam kehidupannya semakin merosot, terutama bagi mereka yang telah pindah ke perkotaan untuk mengikuti fase sosialisasi kedua.

Berdasarkan atas hasil penelitian kami, fungsionalitas pendidikan formal sebagai katalisator dalam proses transformasi sosial membawa tiga dimensi:

1. Pendidikan mendorong segregasi kawasan antara anggota keluarga
2. Pendidikan mendorong diferensiasi cara kehidupan
3. Pendidikan mendorong gejala keterasingan (alienasi) antar-generasi.

1. Perubahan Sosialisasi dan Keterasingan Antargenerasi

Dalam wawancara mendalam, dimensi kedua dan ketiga selalu disebutkan, terutama oleh penduduk usia tua yang sering menilai sikap anak-anak desa sebagai kenakalan (*deviance*). Bersama-sama dengan Mead (1978) kami diharuskan menyimpulkan bahwa diferensiasi dalam sistem pendidikan mengakibatkan pemisahan antara generasi. Tingkat pendidikan pemuda yang rata-rata lebih tinggi daripada generasi tua menciptakan semacam perasaan superioritas (keunggulan) bagi angkatan muda. Tetapi yang merasa superior tidak mau lagi mengikuti peraturan kehidupan yang dilakukan oleh bagian masyarakat yang dianggap lebih rendah.

"Sebab anak-anak dewasa kini ikut pendidikan lebih lama, jelas mereka tahu lebih banyak daripada orang tua. Mereka tahu baca dan tulis, menghitung lebih baik dan biasanya tahu bahasa Indonesia lebih baik dibandingkan dengan orang tua, apalagi bahasa asing. Karena itu, sering mereka merasa unggul (sombong), mereka tidak mampu lagi merasa bawahan terhadap orang tua dan tokoh-tokoh masyarakat, mereka bikin apa saja yang mereka mau tanpa merasa malu. Mereka tidak mampu menilai yang dibuat oleh orang tuanya bagi mereka" (Petani)

Dalam masyarakat desa yang lebih maju cara penyampaian pengetahuan dan pengalaman (sosialisasi) para generasi muda sangat berubah dibandingkan dengan yang dialami oleh generasi-generasi tua. Sosialisasi secara 'alam' di tengah sistem reproduksi keluarga dan masyarakat di sekitarnya

telah digantikan dengan perencanaan masa depan secara eksplisit. Anak-anak mendapat posisi eksklusif yang lebih bebas dari tugas sebagai pencari nafkah. Sebaliknya mereka sering didukung oleh keluarganya untuk melanjutkan pendidikan.

"In the course of this process socialization has turned into education. What had once been a rather accidental byproduct of the early and multifarious integration of children into the demotic process of production has turned into the parents' central task of their life. This process can be explained on the one hand by the differentiation and therefore the growing complexity of society, and, on the other hand, by the growing capability of the parents to face the task of education as a conscious planning of the infant's process of development" (Schumacher/Vollmer 1982: 259).

Keputusan orang tua untuk mendorong karier akademis bagi anak-anak membawa beberapa implikasi terhadap perubahan sosialisasi. Keluarnya mereka dari keluarga telah dimulai pada umur enam tahun dengan memasuki lembaga pendidikan pertama, yaitu SD. Data tersebut merupakan langkah pertama (kecuali TK) dalam perjalanan desintegrasi rumah tangga; selain itu juga langkah pertama dalam pembagian kerja antara yang dilakukan tangan dan yang dengan pikiran. Orang tua memegang tanggung jawab terhadap kelangsungan pendidikan melalui pekerjaan kasar, dan sebaliknya kewajiban bagi anak-anak untuk ikut mencari nafkah semakin merosot. Selain pengetahuan ilmiah melalui studi di

perkotaan, mereka menempuh sebuah gaya hidup (*life-style*) baru yang pada umumnya sangat berbeda dari cara hidup yang mengatur 'dunia kehidupan' orang tua.

Dampak dari diferensiasi sosialisasi berlipat dua. Di sisi satu, latar belakang untuk mengumpulkan pengalaman dan pengetahuan antargenerasi sangat berbeda, sama dengan tuntutan lingkungan sosial terhadap perilaku. Contoh, meskipun semakin lemah, *mapalus* (gotong royong) sebagai norma sosial memaksakan masyarakat desa ikut serta dalam prinsip perilaku timbal-balik (*reciprocity*). Dengan demikian, stabilitas masyarakat desa tradisional (yang masih sangat berarti bagi generasi tua di desa penelitian) berdasarkan atas kerja sama, atas orientasi ke arah kelompok. Perilaku itu sering tidak sesuai dengan peraturan di lembaga-lembaga pendidikan formal; bukan kerja sama melainkan persaingan menyusun perilaku sosial menuntut prestasi individual yang bukan kolektif. Perilaku timbal-balik adalah sesuatu yang dilarang, baik secara eksplisit (misalnya dalam ujian, tes, dll) atau secara implisit dalam persaingan antara mahasiswa untuk mendapat indeks prestasi yang baik. Sebagai akibat dari percobaan mencapai salah satu posisi sebaik mungkin untuk meningkatkan kemungkinan mendapatkan pekerjaan, maka prinsip kerja sama menghilangkan manfaat dan menjadi disfungsi. Diukur dari segi tuntutan pamong desa, juga dari segala tingkat pemerintahan bagi masyarakat untuk melestarikan peradaban sosial, maka lembaga-lembaga pendidikan formal, terutama di tingkat perguruan tinggi merupakan:

"places of wrong learning. (...) In the imported institutions of education these traditions are

discriminated against. The principle of mutual help and collective decision (gotong royong), for example, traditionally is of great significance in the Javanese village. In contrast to this, at school the principle of individual achievements under conditions of competition is stressed ... The dropping out of an extremely high number of pupils and students signals ... the cultural break. In other words, this strongly indicates an alienation from basic elements of one's own tradition, which is brought about by the mechanisms of these institutions" (Karcher 1985: 60).

2. Transformasi Aspirasi: Dari Generasi Pengorbanan ke Generasi Konsumsi

Sesuai dengan perubahan sosialisasi, pola aspirasi menurut generasi juga mengalami transformasi cukup signifikan. Pada umumnya orang tua di desa memproyeksikan aspirasi, harapan, dan keinginan pada generasi berikutnya. Kemungkinan meningkatkan status sosial bagi anak (dan karena itu 'nama' keluarga keseluruhannya) semakin realistis jika orang tua bersikap cukup rajin, rasional, dan matiraga. Jadi, semacam dialektik antara matiraga/kerendahan hati dan peningkatan status sosial merupakan realitas bagi banyak keluarga yang sukses.

"Betul, di desa kami hampir tidak ada keluarga yang tidak merasa keberatan dalam percobaan menyekolahkan anak. Tidak ada yang kaya, semua harus kerja keras. Hampir semua rumah tangga mempunyai beberapa anak. Dulu kami belum tahu

banyak tentang KB. Orang tua yang menyukseskan pendidikan anak-anak selalu mengurus ongkosnya. Mereka selalu pusing dan bertanya pada diri-sendiri dari mana kami mendapat uang untuk masa depan?" (Petani/Pedagang Kecil)

Hasil wawancara pada generasi tua membuktikan asumsi bahwa pekerjaan dan tanggung jawab terhadap anggota rumah tangga dan lingkungan sosial merupakan dasar kehidupan mereka. Pengetahuan tentang keluarga berencana masih kurang dikembangkan dan jumlah anak antara lima dan sepuluh masih dianggap normal. Melahirkan anak adalah sebagian alam dalam kehidupan sehari-hari dan biasanya jumlah anak tidak menjadi tujuan perencanaan.

"Dulu kami tidak memikirkan tentang anak-anak. Bukan kami yang memutuskan tentang jumlah anak melainkan Tuhan. Kami selalu senang dan gembira jika tambah satu lagi, meskipun dari segi nafkah setiap anak meningkatkan beban kami... Kami hidup untuk anak kami" (Ibu S. Guru)

Orientasi generasi tua sangat berbeda dibandingkan dengan angkatan muda. Program KB yang dipromosikan oleh pemerintah Indonesia sangat sesuai dengan keinginan sebagian besar generasi muda yang lebih cenderung meningkatkan kebebasan dan tingkat konsumsi.

"Jika kami menikah kami kurang bebas. Kami tidak bisa ke mana-mana dan membutuhkan uang lebih banyak dan cuma sebagian kecil dari yang diinginkan dapat dipenuhi. Kami harus berpikir tentang kami sendiri supaya kami

hidup sebaik mungkin. Kalau ada anak semua akan berubah secara total. Karena itu tidak usah menikah cepat" (Mahasiswi).

Sesuai dengan kesimpulan pernyataan-pernyataan dari sebagian besar mahasiswa asal Desa Kanonang, maka dapat dikatakan bahwa jalan hidup yang diikuti oleh orang tua di pedesaan kurang menarik bagi mereka. Pekerjaan sebagai fokus kehidupan, kewajiban untuk mengebawahkan pada struktur nilai sosial, menyerahkan keinginan menikmati kehidupannya, dan memfokuskan keinginan diri sendiri pada generasi berikut tidak merupakan salah satu alternatif dibandingkan dengan cara hidup yang lebih otonom dan bebas.

"Memang susah kehidupan orang tua kami. Selalu bekerja terus dan sering mereka tidak mempunyai cukup makanan. Kebutuhan bagi anak-anak selalu diutamakan... Mereka hidup di dalam rumah kayu dengan atap dan jendela yang rusak. Rumah sendiri terlalu kecil, tetapi mereka tidak punya uang untuk membangun yang baru. Semua digunakan untuk saya dan enam kakak-adik. Kami tidak ingin hidup seperti orang tua" (N., Laki-Laki, Drop Out)

3. Masalah Jaminan Sosial

Untuk menyimpulkan dampak sosial perkembangan pendidikan formal terhadap hubungan antara generasi, perlu digarisbawahi lagi tentang kompleksitas keterasingan yang telah dibahas. Jika diikuti situasi orang tua di pedesaan, dibedakan antara tiga bentuk segregasi.

1. Segregasi kawasan. Sebagai akibat dari mobilitas penduduk yang ditingkatkan melalui perkembangan

pendidikan (sebagai salah satu faktor yang sangat berperan antara faktor-faktor lain, misalnya media massa, perkembangan lalu-lintas, dll.) semakin besar orang tua ditinggalkan di desa.

2. Segregasi kebudayaan. Dengan latar belakang sosialisasi dan pengalaman yang semakin berbeda, bagian penduduk angkatan muda menciptakan aneka ragam aspek kebudayaan baru yang sering tidak sesuai dengan keinginan/kebutuhan bagian keluarga di desa.
3. Segregasi ekonomi. Bentuk rumah tangga tradisional sebagai persatuan ekonomis dan sosial dan unit reproduksi semakin merosot. Ada kecenderungan ke arah keluarga inti.

Penilaian generasi tua terhadap masalah jaminan sosial mencerminkan kekhawatiran terhadap masa depan yang kurang jelas. Lain dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya, mereka harus menyesuaikan diri dengan keadaan baru yang belum dikenal. Baik bantuan anak-anak dalam keadaan darurat (misalnya penyakit) dan dukungan untuk hari tua maupun pelestarian ekonomi pertanian tidak lagi dijamin sebab kekurangan tenaga kerja.

"Kami tidak tahu bagaimana kehidupan kami nanti. Kami tetap sehat dan bisa bekerja, meskipun tidak sama dengan dulu. Tetapi bagaimana sesudah beberapa tahun? Susah sewa tenaga kerja di sini. Anak-anak kami ingin membantu tetapi mereka tinggal di kota, jadi tidak bisa... Jarang mereka ke sini, biasanya Minggu atau hari raya. Sering kami harus membayar untuk perjalanan mereka ke sini. Susah memang. Yang muda berangkat ke kota dan

yang tua tinggal sendirian di sini"
(Petani)

Masalah jaminan sosial tersebut menciptakan satu gejala yang sangat menarik. Jaminan yang secara tradisional diberikan melalui bantuan intergeneratif (antara generasi) semakin diubah ke arah bantuan intrageneratif, bantuan antara anggota generasi tua untuk menjamin reproduksi. Tolong-menolong serta bentuk-bentuk bantuan tradisional lain meningkatkan kepentingannya dalam bagian masyarakat desa usia tua, yang merasa sebagai 'teman senasib', bukan hanya dari segi integrasi masyarakat, melainkan lebih berperan dari segi kelangsungan hidup.

"Dewasa ini orang yang tua hidup lebih sepi dibandingkan dengan dulu. Orang muda tidak merasa tertarik berkomunikasi dengan kami. Dulu anak-anak harus membantu orang tua, prasyarat keselamatan itu tidak pernah diragukan, apalagi dalam keadaan darurat. Pada zaman ini kami yang tua harus saling membantu. Kami tetap ikut tolong-menolong dan *mapalus*, baik di kebun maupun di bidang lain. Jika misalnya istri saya jatuh sakit dan tidak bisa masak, biasanya perempuan tetangga yang juga tua akan membantu... Dewasa ini kami lebih tergantung pada generasi kami daripada anak-anak kami" (Petani).

IV. Kesimpulan

Hasil penelitian di daerah Minahasa dapat disimpulkan bahwa strategi mengikuti jalur pendidikan setinggi mungkin mengakibatkan beberapa gejala yang bersifat problematis; kecenderungan asumsi itu dapat

diterapkan untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan perkembangan pendidikan di Indonesia secara keseluruhan. Akibat-akibat dari sudut ekonomi dan ilmu sosial yang telah dibahas dalam makalah ini membawa bahaya frustrasi, salah satu perasaan kekecewaan muncul di tempat penelitian. Dasar frustrasi itu merupakan ketidakseimbangan antara harapan dan kenyataan. Jika tujuan aspirasi tidak dapat dicapai, maka sering mereka merasa gagal, malu, dan kehilangan muka (nama), apalagi dalam konteks sosial di desa terpencil yang tidak anonim melainkan disusun oleh kontrol sosial yang ketat.

Alasan-alasan yang menciptakan frustrasi sangat berbeda. Bagi kaum berpendidikan tinggi atau menengah, pengangguran menjadi alasan utama. Dengan menjadi penganggur, maka tingkat pendidikan yang telah dicapai tidak memberi manfaat, baik dari segi ekonomi maupun dari segi status sosial. Dalam kasus tersebut semua terlibat dengan kekecewaan, baik si pencari kerja maupun keluarganya.

Kerendahan potensi ekonomi dalam rumah tangga di desa yang telah dibahas sering dapat ditingkatkan dengan masalah reintegrasi anak penganggur pada masyarakat desa. Sering terjadi bahwa anak yang pulang tidak ingin lagi menjadi anggota masyarakat seperti dulu, yang selalu diwajibkan ikut serta *mapalus*, tolong-menolong, kerja bakti, dan kegiatan-kegiatan ekonomis yang tidak diinginkan. Mereka menjadi kaum kampung, menjadi sebagian dari masyarakat desa yang harus hidup dalam keadaan bersifat tradisional, meskipun keinginan mereka lebih diarahkan pada jalan kehidupan lebih modern, lebih urban. Dalam masyarakat desa, kaum kampung dinilai sebagai *sub-culture*,

sebab mereka mempunyai struktur nilai sosial, norma, dan sikap yang sangat berbeda dari masyarakat. Tetapi mau atau tidak, masalah ekonomi mewajibkan para penganggur kembali ke rumah tangga orang tua meskipun jarak mental antara mereka dan masyarakat terlalu jauh.

Dari segi perubahan sosial perpisahan antargenerasi - dan dengan demikian perubahan fokus aspirasi - paling menonjol dan paling berat dirasakan oleh orang tua. Meskipun gejala itu dipengaruhi oleh beberapa faktor (media massa, mobilitas kawasan, dll.), pendidikan formal dalam bentuk yang dibahas dalam makalah ini berperan sangat besar. Dengan demikian, bisa diajukan pertanyaan bersama-sama dengan pengakuan seorang tua di Desa Kanonang:

"Sekarang kami sangat bingung, sungguh-sungguh. Dua anak kami studi sampai menjadi sarjana, tetapi kemudian mereka tidak mendapat pekerjaan. Yang pertama mencari sejak tiga tahun yang lalu tanpa hasil. Dia tinggal di rumah, tidak mau ikut orang tua ke kebun, tidak mau membantu Terlalu kasar katanya. Dia nongkrong saja, suka ke warung untuk bertemu dengan teman. Suka main dan minum. Apa yang bisa kami perbuat?. Kami adalah petani saja, orang sederhana tanpa pendidikan. Kami harus bergaul dengan masyarakat desa. Tetangga-tetangga selalu bertanya tentang anak-anak. Apakah mereka membantu, apakah mereka masih ke gereja?. Sungguh kami malu. Dan berapa tahun kami bekerja terus untuk biaya studi. Tetapi tidak tahu ke mana...." (Petani)

DAFTAR PUSTAKA

- Benda-Beckinnann, F.v. and K.v. 1989. "Where structures merge: state and 'off-state' involvement in rural social security on Ambon. Paper presented at the *EIDOS-Conference*, Amsterdam, March 1989.
- Bourdieu, P. 1985. "Onomisches Kapital, kulturelles Kapital, soziales Kapital, in Kreckel, R. (Hrsg.), *Soziale Ungleichheiten*. Soziale Welt, Sonderband 2, S. 183-198.
- Buchholt, H. 1990. *Kirche, Kopra, Burokraten. Gesellschaftliche Entwicklung und strategisches Handeln in Nord Sulawesi/ Indonesien*. Saarbrücken/Fort Lauderdale.
- Clauss, W., Hartmann, J. 1981. *Agrarentwicklung in Indonesien - zwei Betsptele aus Nord-Sumatra und Java*. Working Paper No. 7 des Porschungsschwerpunkts Entwicklungssoziologie der Universitat Bielefeld.
- Dore, R. 1976. *The Diploma disease. Education, qualification and development*. London
- Effendi, Sofian, et al. *Studi implikasi sosial: peledakan penduduk usia muda*. Yogyakarta: Kerjasama Kantor Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup dengan Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada.
- Jones, G. 1977. *The population of North Sulawesi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Karcher, W. 1985. "Zwischen Modernisierung und Entfremdung: Stand und Tendenzen der Hochschulausbildung in Indonesien", *Internationales Asienforum*, 16 (1/2): 59-81.
- Kroeskamp, H. 1974. *Early schoolmasters in a developing country: a history of experiments in school education in 19th Century Indonesia*. Assem.
- Mead, M. 1978. *Culture and commitment: the new relationships between the generations in the 1970s*.
- Murgianto. 1991. *Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pemanfaatan tenaga kerja usia muda: studi kasus di Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, Jawa Timur*. Tesis dalam Program S2 Studi Kependudukan, Jurusan antar Bidang, Fakultas Pasca Sarjana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. (Belum diterbitkan).
- Notodihardjo, H. 1990. *Pendidikan tinggi dan tenaga kerja tingkat tinggi di Indonesia: studi tentang kaitan antara perguruan tinggi dan industri di Jawa*. Jakarta: UI-Press.
- Popkin, S.L. 1979. *The rational peasant: the political economy of rural society in Vietnam*. Berkeley: University of California Press.
- Scott, J. 1976. *The moral economy of the peasant: rebellion and subsistence in Southeast Asia*. New Haven: Yale University Press.
- Weber, H. 1991. Internal or external orientation: the importance of villages in contemporary Minahasa, in Mai, U.; Buchholt, H. eds.: *Continuity, change and aspiration: social and cultural life in Minabasa*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies. (Akan terbit).

-----, 1991. "Searching for security in a changing world: the Indonesian concept of development and its impact on the process of social transformation, in Mai, U.; Buchholt, H. eds.: *Continuity, change and aspiration: social and cultural life in Minahasa*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies. (Akan terbit).

White, B. 1976. *Production and reproduction in a Javanese village*. Bogor.